

## MODEL KURIKULUM REKONTRUKSI SOSIAL: MENGUBAH KURIKULUM UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG LEBIH ADIL DAN DEMOKRATIS

Lutfi Nurmaidah

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
[lutfinurmaidah72@gmail.com](mailto:lutfinurmaidah72@gmail.com)

### *Abstract*

*This study aims to examine the implementation of the social reconstruction curriculum model in promoting a more just and democratic society. The main problem addressed is the low relevance of existing curricula to real social issues, such as inequality, marginalization, and the lack of democratic participation among students. The method used in this research is a literature review with a qualitative approach, analyzing various scholarly sources related to curriculum studies and critical education. The results indicate that the social reconstruction curriculum model serves as an effective alternative for integrating social issues into the learning process. This approach encourages students to think critically, participate actively, and develop social awareness toward issues in their communities. Furthermore, the role of teachers as facilitators is crucial in creating dialogical and reflective learning environments. Therefore, the implementation of a socially oriented curriculum has significant potential to foster socially conscious individuals who contribute to the development of a more democratic and equitable society.*

**Keywords:** *Social Reconstruction Curriculum, Social Justice, Democratic Education, Critical Pedagogy, Participatory Learning*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan model kurikulum rekonstruksi sosial dalam upaya mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan demokratis. Permasalahan utama yang diangkat adalah masih rendahnya relevansi kurikulum terhadap realitas sosial, seperti ketimpangan, marginalisasi, dan kurangnya partisipasi demokratis peserta didik. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif melalui analisis berbagai sumber ilmiah terkait kurikulum dan pendidikan kritis. Hasil kajian menunjukkan bahwa model kurikulum rekonstruksi sosial mampu menjadi alternatif dalam mengintegrasikan isu-isu sosial ke dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, berpartisipasi aktif, serta memiliki kepedulian terhadap permasalahan sosial di lingkungannya. Selain itu, peran guru sebagai fasilitator menjadi sangat penting dalam menciptakan pembelajaran yang dialogis dan reflektif. Dengan demikian, implementasi kurikulum rekonstruksi sosial berpotensi besar dalam membentuk individu yang sadar sosial dan berkontribusi terhadap terciptanya masyarakat yang demokratis dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** Kurikulum Rekonstruksi Sosial, Keadilan Sosial, Pendidikan Demokratis, Pedagogi Kritis, Pembelajaran Partisipatif

### **PENDAHULUAN**

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia sekaligus menentukan arah perkembangan suatu masyarakat. Dalam konteks global yang terus berubah, sistem pendidikan dituntut tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial. Namun, realitas menunjukkan bahwa kurikulum yang diterapkan di banyak lembaga pendidikan masih cenderung berorientasi pada aspek kognitif semata dan kurang responsif terhadap persoalan-persoalan sosial yang

berkembang di masyarakat. Kondisi ini berdampak pada rendahnya sensitivitas sosial peserta didik serta terbatasnya kemampuan mereka dalam memahami dan menyelesaikan masalah sosial secara kritis. Permasalahan ketimpangan sosial, marginalisasi kelompok tertentu, ketidakadilan, serta lemahnya praktik demokrasi menjadi isu yang masih relevan di berbagai konteks, termasuk di Indonesia. Pendidikan seharusnya mampu menjadi solusi dalam menjawab tantangan tersebut. Akan tetapi, kurikulum yang bersifat statis dan kurang kontekstual justru memperlebar jarak antara dunia pendidikan dan realitas sosial. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan kurikulum yang mampu menjembatani kesenjangan tersebut, salah satunya melalui model kurikulum rekonstruksi sosial.

Kurikulum rekonstruksi sosial merupakan pendekatan yang menempatkan pendidikan sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Model ini berakar pada pemikiran teori kritis yang menekankan pentingnya kesadaran sosial, emansipasi, dan partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Tokoh-tokoh seperti George S. Counts dan Paulo Freire menjadi landasan penting dalam pengembangan paradigma ini, di mana pendidikan dipandang sebagai proses dialogis yang membebaskan dan memberdayakan individu untuk terlibat dalam perubahan sosial. Dalam perspektif kurikulum rekonstruksi sosial, peserta didik tidak hanya diposisikan sebagai penerima informasi, tetapi sebagai subjek aktif yang memiliki peran dalam menganalisis dan menyelesaikan persoalan sosial. Pembelajaran dirancang berbasis masalah nyata yang terjadi di lingkungan sekitar, sehingga mendorong keterlibatan langsung peserta didik dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial, kemampuan berpikir kritis, dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi.

Selain itu, pendekatan ini juga menuntut perubahan peran guru dari sekadar penyampai materi menjadi fasilitator yang membimbing proses pembelajaran secara dialogis dan reflektif. Guru diharapkan mampu menciptakan ruang belajar yang terbuka, inklusif, dan partisipatif, sehingga peserta didik dapat mengemukakan pendapat, berdiskusi, serta mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap isu-isu sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan demokratis yang menekankan kesetaraan, kebebasan berpendapat, dan penghargaan terhadap keberagaman. Namun demikian, implementasi kurikulum rekonstruksi sosial tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah kesiapan tenaga pendidik dalam mengadopsi pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada isu sosial. Selain itu, sistem evaluasi pendidikan yang masih berfokus pada pencapaian akademik juga menjadi hambatan dalam mengukur keberhasilan pembelajaran berbasis rekonstruksi sosial. Di sisi lain, dukungan kebijakan dan lingkungan pendidikan yang kondusif juga sangat diperlukan agar model kurikulum ini dapat diterapkan secara efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai model kurikulum rekonstruksi sosial sebagai alternatif dalam mengembangkan sistem pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan praktik pendidikan, khususnya dalam upaya mewujudkan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan demokratis melalui proses pendidikan yang transformatif. Dengan demikian, pendahuluan ini menegaskan bahwa pembaruan kurikulum merupakan suatu keharusan dalam menghadapi dinamika sosial yang semakin kompleks. Kurikulum rekonstruksi sosial hadir sebagai salah satu solusi yang tidak hanya

berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga pada pembentukan kesadaran sosial dan tanggung jawab kolektif. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara komprehensif konsep, implementasi, serta implikasi dari model kurikulum rekonstruksi sosial dalam konteks pendidikan modern.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian konsep, teori, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan model kurikulum rekonstruksi sosial. Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai landasan teoretis, prinsip, serta implementasi kurikulum dalam konteks pendidikan yang berorientasi pada perubahan sosial.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengkaji, dan mengumpulkan berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan kurikulum dan pendidikan kritis. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari karya-karya ilmiah yang secara langsung membahas konsep kurikulum rekonstruksi sosial, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur pendukung yang relevan dengan topik penelitian, seperti teori pendidikan, kebijakan kurikulum, serta hasil penelitian sebelumnya.

Tipe data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa teks, gagasan, dan konsep yang terkandung dalam sumber-sumber literatur. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan cara mengelompokkan, membandingkan, dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh untuk menemukan pola, hubungan, serta makna yang relevan dengan fokus penelitian. Proses analisis dilakukan secara sistematis dan mendalam agar menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai model kurikulum rekonstruksi sosial serta implikasinya dalam dunia pendidikan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Konsep Dasar Kurikulum Rekonstruksi Sosial**

#### **1. Pengertian Kurikulum Rekonstruksi Sosial**

Kurikulum rekonstruksi sosial merupakan model pengembangan kurikulum yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen strategis dalam proses transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih adil, demokratis, dan berkeadilan (Syafei, I. 2025). Dalam perspektif ini, pendidikan tidak dipahami sekadar sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi sebagai praktik sosial yang sarat nilai, ideologi, dan kepentingan yang dapat membentuk arah perubahan masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai dokumen akademik, tetapi juga sebagai alat rekonstruksi sosial yang mampu merespons berbagai persoalan nyata seperti ketimpangan ekonomi, diskriminasi sosial, marginalisasi kelompok tertentu, serta rendahnya partisipasi warga dalam kehidupan demokratis.

Kajian literatur menunjukkan bahwa pendekatan ini lahir sebagai kritik terhadap kurikulum tradisional yang terlalu berorientasi pada aspek kognitif dan kurang kontekstual terhadap realitas sosial (Qubro, N. A. K., 2026). Akibatnya,

proses pembelajaran sering kali terlepas dari kehidupan nyata peserta didik sehingga tidak mampu membentuk kesadaran sosial yang kritis. Dalam kerangka kurikulum rekonstruksi sosial, peserta didik diposisikan sebagai agen aktif yang tidak hanya memahami realitas, tetapi juga mampu menganalisis, mengkritisi, dan melakukan perubahan sosial secara sadar dan bertanggung jawab.

## 2. Landasan Teoretis Kurikulum Rekonstruksi Sosial

Secara teoretis, kurikulum rekonstruksi sosial berakar kuat pada pedagogi kritis yang dikembangkan oleh Paulo Freire (Utubira, E. E. M., 2026). Konsep utama dalam pendekatan ini adalah conscientization atau kesadaran kritis, yaitu kemampuan individu untuk memahami struktur sosial yang menindas sekaligus menyadari perannya dalam melakukan transformasi sosial. Pendidikan dalam pandangan Freire bersifat dialogis, di mana guru dan peserta didik berada dalam hubungan yang setara dan saling belajar, bukan hubungan hierarkis yang menempatkan guru sebagai satu-satunya sumber pengetahuan.

(Suharto, T. 2012). menegaskan bahwa pendidikan merupakan praktik politik yang tidak dapat dipisahkan dari relasi kekuasaan dan ideologi. Oleh karena itu, kurikulum harus dirancang untuk membangun kesadaran kritis terhadap ketidakadilan sosial serta mendorong keterlibatan aktif peserta didik dalam perubahan sosial. Sementara itu, (Azhari, H. 2025) menambahkan bahwa kurikulum selalu mengandung kepentingan tertentu, sehingga pendidikan demokratis menjadi penting untuk memastikan adanya ruang partisipasi, kebebasan berpikir, dan kesetaraan dalam proses pembelajaran.

### B. Prinsip-Prinsip Kurikulum Rekonstruksi Sosial

Kurikulum rekonstruksi sosial memiliki seperangkat prinsip fundamental yang menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Prinsip-prinsip ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling terintegrasi dalam membentuk sistem pembelajaran yang bersifat transformatif, kontekstual, dan berorientasi pada perubahan sosial. Secara umum, prinsip utama kurikulum ini berakar pada gagasan bahwa pendidikan harus berfungsi sebagai sarana untuk membangun kesadaran kritis dan mendorong terciptanya keadilan sosial dalam masyarakat (Mugara, R., 2025). Prinsip pertama adalah relevansi sosial, yaitu bahwa kurikulum harus disusun berdasarkan kebutuhan, permasalahan, dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Pembelajaran tidak boleh bersifat abstrak dan terpisah dari kehidupan nyata peserta didik, karena hal tersebut akan menyebabkan rendahnya keterhubungan antara sekolah dan masyarakat. Dalam konteks ini, materi pembelajaran harus mampu mencerminkan isu-isu aktual seperti kemiskinan, ketimpangan pendidikan, kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan perubahan budaya. Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi lebih bermakna karena peserta didik dapat melihat langsung hubungan antara teori dan realitas sosial (Mardizal, J., 2024).

Prinsip kedua adalah pembelajaran partisipatif, yaitu keterlibatan aktif peserta didik dalam seluruh proses pembelajaran. Peserta didik tidak lagi diposisikan sebagai objek yang pasif, tetapi sebagai subjek yang memiliki pengalaman, pengetahuan awal, dan kemampuan

untuk membangun pemahaman baru melalui interaksi sosial. Pembelajaran partisipatif menekankan kerja sama, diskusi, kolaborasi, serta keterlibatan dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Hal ini sejalan dengan pandangan Dewey yang menegaskan bahwa pendidikan harus berbasis pengalaman (*learning by doing*) agar lebih bermakna dan efektif dalam membentuk karakter peserta didik. Prinsip ketiga adalah pedagogi kritis, yang menekankan kemampuan peserta didik dalam menganalisis, mempertanyakan, dan mengevaluasi struktur sosial yang ada. (Fantofik, D., 2025) Dalam prinsip ini, peserta didik diajak untuk memahami bahwa berbagai masalah sosial tidak terjadi secara alami, tetapi merupakan hasil dari struktur sosial, ekonomi, dan politik yang tidak seimbang. Oleh karena itu, pembelajaran harus mendorong peserta didik untuk berpikir reflektif dan kritis terhadap realitas yang mereka alami. Pedagogi kritis juga menuntut adanya kesadaran bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk atau mengubah struktur masyarakat.

Prinsip keempat adalah pendidikan demokratis, yaitu pembelajaran yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan, kebebasan berpendapat, dialog, dan penghargaan terhadap keberagaman. Dalam proses ini, kelas dipandang sebagai ruang demokrasi kecil di mana setiap peserta didik memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat tanpa diskriminasi. Guru berperan sebagai fasilitator yang mendorong terciptanya diskusi terbuka dan menghargai perbedaan perspektif. Pendidikan demokratis juga menekankan pentingnya pengambilan keputusan secara kolektif dalam proses pembelajaran.

Prinsip kelima adalah orientasi tindakan sosial, yaitu bahwa proses pembelajaran harus menghasilkan dampak nyata dalam kehidupan masyarakat. Artinya, hasil belajar tidak hanya diukur dari aspek kognitif, tetapi juga dari sejauh mana peserta didik mampu menerapkan pengetahuan mereka untuk melakukan perubahan sosial yang positif. Tindakan ini dapat berupa kegiatan sosial, kampanye kesadaran, atau partisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat.

Prinsip ini menegaskan bahwa tujuan akhir pendidikan adalah terbentuknya individu yang mampu berkontribusi terhadap terwujudnya keadilan sosial (Edi, M. G. P. 2025).

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa kurikulum rekonstruksi sosial merupakan model kurikulum yang bersifat holistik, karena tidak hanya menekankan aspek pengetahuan, tetapi juga sikap, nilai, dan tindakan sosial. Integrasi antara pembelajaran partisipatif, pedagogi kritis, dan pendidikan demokratis menjadikan kurikulum ini relevan dalam menjawab tantangan pendidikan di era modern yang kompleks dan penuh ketimpangan sosial.

### **C. Implementasi dalam Proses Pembelajaran**

Implementasi kurikulum rekonstruksi sosial dalam proses pembelajaran menuntut adanya perubahan paradigma dari pembelajaran yang bersifat *teacher-centered* menjadi *student-centered* yang berorientasi pada pengalaman nyata dan isu sosial. Dalam konteks ini, pembelajaran tidak lagi dipahami sebagai proses penguasaan materi semata, tetapi sebagai proses rekonstruksi pengetahuan yang berhubungan langsung dengan realitas sosial peserta didik. Salah satu pendekatan utama yang digunakan adalah *Problem-Based Learning (PBL)*, di mana peserta didik dihadapkan pada permasalahan sosial yang kompleks dan kontekstual seperti kemiskinan struktural, ketimpangan pendidikan, pengangguran, intoleransi sosial, serta degradasi lingkungan (WAGINO, S. 2025). Melalui pendekatan ini, peserta didik tidak

hanya diminta untuk memahami masalah, tetapi juga menganalisis akar penyebab, dampak sosial, serta merumuskan alternatif solusi yang realistis dan aplikatif. Selain PBL, Project-Based Learning (PBL) juga menjadi strategi penting dalam implementasi kurikulum ini karena memberikan ruang bagi peserta didik untuk terlibat langsung dalam kegiatan sosial yang nyata. Dalam model ini, peserta didik dapat merancang dan melaksanakan proyek seperti kampanye kesadaran lingkungan, kegiatan bakti sosial, pemberdayaan masyarakat lokal, atau program edukasi masyarakat (Khasanah, N., 2025). Aktivitas tersebut tidak hanya meningkatkan keterampilan akademik, tetapi juga memperkuat nilai pembelajaran partisipatif karena peserta didik berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Lebih lanjut, metode diskusi kritis, debat terbuka, studi kasus, dan simulasi sosial menjadi bagian penting dalam pembelajaran. Melalui diskusi, peserta didik dilatih untuk mengemukakan pendapat, mendengarkan perspektif orang lain, serta mengembangkan kemampuan argumentasi yang logis dan etis. Proses ini secara langsung mendukung prinsip pendidikan demokratis, karena kelas menjadi ruang publik kecil yang mencerminkan kehidupan demokrasi yang sesungguhnya (Rijal, M. 2025). Selain itu, refleksi kritis juga menjadi elemen penting dalam setiap pembelajaran, di mana peserta didik diajak untuk menghubungkan pengalaman belajar dengan realitas sosial yang lebih luas serta mengevaluasi peran mereka dalam masyarakat. Dengan demikian, implementasi kurikulum rekonstruksi sosial menghasilkan pembelajaran yang tidak hanya bermakna secara akademik, tetapi juga transformatif secara sosial.

#### **D. Guru dalam Kurikulum Rekonstruksi Sosial**

Dalam kurikulum rekonstruksi sosial, peran guru mengalami transformasi mendasar dari otoritas tunggal menjadi fasilitator pembelajaran yang berperan sebagai pengarah proses berpikir kritis peserta didik. Guru tidak lagi menjadi pusat pengetahuan, tetapi menjadi mediator yang menciptakan ruang dialog, refleksi, dan kolaborasi dalam proses pembelajaran. Dalam konteks pedagogi kritis, guru memiliki tanggung jawab untuk membantu peserta didik memahami bahwa pengetahuan tidak bersifat netral, melainkan terkait erat dengan struktur kekuasaan, ideologi, dan ketidakadilan sosial (Hidayah, M. U., (2023). Sebagai fasilitator, guru berperan dalam merancang strategi pembelajaran yang mendorong keterlibatan aktif peserta didik melalui pendekatan pembelajaran partisipatif. Hal ini mencakup penggunaan metode diskusi kelompok, kerja proyek, studi kasus, serta pembelajaran berbasis isu sosial yang relevan dengan kehidupan peserta didik. Guru juga berperan dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis yang mendorong peserta didik untuk berpikir lebih dalam, seperti mengapa suatu ketimpangan sosial terjadi, siapa yang diuntungkan, dan bagaimana solusi yang dapat dilakukan secara kolektif.

Dalam konteks pendidikan demokratis, guru menjadi model yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi seperti keterbukaan, kesetaraan, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat. Guru juga harus mampu menciptakan lingkungan kelas yang aman secara psikologis, di mana peserta didik merasa bebas untuk mengemukakan pendapat tanpa takut disalahkan. Selain itu, guru memiliki peran penting dalam mengintegrasikan isu-isu keadilan sosial ke dalam pembelajaran, sehingga peserta didik dapat memahami relevansi materi dengan kehidupan nyata. Namun demikian, implementasi peran ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Banyak guru masih terjebak dalam pola pembelajaran konvensional yang

berorientasi pada hasil ujian dan hafalan. Selain itu, keterbatasan pelatihan mengenai pendekatan kritis, beban administratif yang tinggi, serta sistem evaluasi yang belum mendukung pembelajaran berbasis proses menjadi hambatan dalam penerapan kurikulum ini (Lubis, K. U., 2024). Oleh karena itu, diperlukan penguatan kompetensi guru secara berkelanjutan agar mampu menjalankan peran sebagai agen perubahan sosial dalam pendidikan.

#### **E. Implikasi terhadap Peserta Didik**

Penerapan kurikulum rekonstruksi sosial memberikan implikasi yang sangat luas terhadap perkembangan peserta didik, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun sosial. Dari aspek kognitif, peserta didik mengalami peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, evaluasi, dan refleksi kritis. Kemampuan ini berkembang sebagai hasil dari penerapan pedagogi kritis, yang mendorong peserta didik untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mempertanyakan, mengkritisi, dan memahami struktur sosial yang melatarbelakanginya (Widiantie, R. 2025). Thalibul Ilmi Publishing & Education.. Pada aspek afektif, peserta didik menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap pentingnya keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka menjadi lebih peka terhadap ketimpangan sosial, diskriminasi, serta berbagai bentuk ketidakadilan yang terjadi di lingkungan sekitar. Selain itu, empati sosial peserta didik juga meningkat, terutama terhadap kelompok yang termarginalkan. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum rekonstruksi sosial tidak hanya membentuk kemampuan intelektual, tetapi juga membangun dimensi emosional dan nilai kemanusiaan.

Dari aspek sosial, peserta didik menjadi lebih aktif dalam pembelajaran partisipatif, mampu bekerja sama dalam kelompok, serta lebih percaya diri dalam mengemukakan pendapat. Mereka juga lebih terbiasa dengan proses diskusi yang terbuka dan setara sebagai bagian dari praktik pendidikan demokratis (Ruslandi, U.,2025). Keterlibatan dalam berbagai aktivitas sosial seperti proyek komunitas atau diskusi isu publik membuat peserta didik memiliki pengalaman langsung dalam memahami dinamika sosial di masyarakat. Selain itu, pembelajaran yang berbasis realitas sosial membuat peserta didik lebih mampu menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak hanya meningkatkan motivasi belajar, tetapi juga memperkuat kesadaran mereka sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab sosial. Pada akhirnya, kurikulum rekonstruksi sosial membentuk peserta didik sebagai individu yang kritis, reflektif, demokratis, serta memiliki komitmen kuat terhadap terciptanya \*keadilan sosial\* dalam kehidupan bermasyarakat secara berkelanjutan.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan mengenai model kurikulum rekonstruksi sosial, dapat disimpulkan bahwa kurikulum rekonstruksi sosial merupakan pendekatan pengembangan kurikulum yang menempatkan pendidikan sebagai sarana strategis untuk mendorong perubahan sosial menuju keadilan sosial dan pendidikan demokratis. Kurikulum ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan kesadaran kritis peserta didik terhadap berbagai persoalan sosial seperti ketimpangan, diskriminasi, marginalisasi, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokratis. Secara

teoretis, kurikulum rekonstruksi sosial berlandaskan pada pedagogi kritis yang menekankan kesadaran reflektif (conscientization), dialog, dan tindakan sosial. Konsep ini menegaskan bahwa pendidikan bukanlah proses yang netral, melainkan sarana untuk membangun kesadaran kritis peserta didik terhadap struktur sosial yang ada. Oleh karena itu, peserta didik diposisikan sebagai subjek aktif yang mampu menganalisis, mengkritisi, dan berkontribusi dalam perubahan sosial di lingkungannya.

Dalam implementasinya, kurikulum rekonstruksi sosial diwujudkan melalui pendekatan pembelajaran seperti Problem-Based Learning (PBL), Project-Based Learning (PjBL), diskusi kelompok, dan refleksi kritis. Pendekatan tersebut memperkuat pembelajaran partisipatif yang memberikan ruang bagi peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran serta menghubungkan materi dengan realitas sosial. Selain itu, peran guru berubah dari pusat informasi menjadi fasilitator yang mendorong terciptanya pembelajaran yang dialogis, inklusif, dan demokratis. Implikasi dari penerapan kurikulum ini menunjukkan bahwa peserta didik mengalami peningkatan dalam aspek kognitif, afektif, dan sosial. Mereka menjadi lebih kritis, peka terhadap keadilan sosial, mampu bekerja sama, serta lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat dalam konteks pendidikan demokratis. Dengan demikian, kurikulum rekonstruksi sosial berkontribusi signifikan dalam membentuk peserta didik sebagai agen perubahan sosial yang memiliki kesadaran kritis, tanggung jawab sosial, dan komitmen terhadap terciptanya masyarakat yang lebih adil dan demokratis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, H. (2025). *Struktur Kurikulum Pendidikan*. Feniks Muda Sejahtera.
- Edi, M. G. P. (2025). Filsafat Pendidikan. *Filsafat Pendidikan*, 99.
- Fantofik, D., Usman, U., & Sibawaihi, S. (2025). Metodologi keilmuan pendidikan model learning by doing John Dewey bagi pengembangan ilmu PAI. *PANDAWA*, 7(3), 76-87.
- Hidayah, M. U., & Jumadi, J. (2023). Filsafat Pedagogi Kritis dalam Pendidikan IPA.
- Khasanah, N., Puspitasari, D., Mufidah, E., Kurniyadi, R., Afroni, A., & Aji, G. (2025). *Mengintegrasikan Kesadaran Lingkungan pada Pengajaran di Tingkat Sekolah Dasar*. Penerbit Nem.
- Lubis, K. U., Idaroyanni, M. R., Limbong, S. F. P., & Fauzi, K. A. (2024). Persepsi guru terhadap implementasi kurikulum merdeka di SMA Negeri 1 Deli Tua. *Journal of Education Research*, 5(4), 5814-5819.
- Mardizal, J., & Ramatni, A. (2024). *Sosiologi Pendidikan*. Jonni Mardizal.
- Mugara, R., & Ali, E. Y. (2025). *Kurikulum Dan Pembelajaran Di Pendidikan Dasar Teori, Desain, Strategi, Dan Implementasi Kontekstual Untuk Abad 21*. Penerbit Widina.
- Qubro, N. A. K., & Daraquthni, L. (2026). Sintesis Pendekatan Eklektik Dan Model Kontekstual Dalam Kurikulum Pendidikan Dasar Berbasis Kearifan Lokal: Kajian Literatur. *Elementary School: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran ke-SD-an*, 13(1), 35-62.
- Rijal, M. S., Bakhtiar, M. A., & Damayanti, A. M. (2025). INTERNALISASI NILAI DEMOKRASI PANCASILA MELALUI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DI SEKOLAH. *Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah*, 10(4), 2819-2835.
- Ruslandi, U., Qomariyah, S., & Sumitra, M. (2025). Peran metode pembelajaran diskusi dalam menciptakan keaktifan belajar siswa di MAS Tarbiyatul Islamiyah. *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Matematika*, 2(1), 79-90.
- Suharto, T. (2012). *Pendidikan Berbasis Masyarakat; Relasi Negara dan Masyarakat dalam Pendidikan*.

LKIS Pelangi Aksara.

- Syafei, I. (2025). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Penerbit Widina.
- Utubira, E. E. M., & Lakoruhut, V.(2026) STRATEGI PEMBELAJARAN DIALOGIS DALAM PERSPEKTIF PAULO FREIRE SEBAGAI FONDASI PENDIDIKAN BERMUTU. *Jurnal Kajian Pembelajaran dan Keilmuan*, 10(1), 64-76.
- WAGINO, S. (2025). *PENGEMBANGAN LKPD BERBASIS PROBLEM BASED LEARNING (PBL) UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKN) SISWA KELAS IV SD NEGERI 5 KURIPAN* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS LAMPUNG).
- Widiantie, R. (2025). *Pendidikan untuk Masa Depan: Integrasi Kecakapan Abad 21 dan Pedagogi Kritis*. Thalibul Ilmi Publishing & Education.
- Aslan Aslan and Kok Shiong Pong, "Principals' Leadership Styles and Teachers' Commitment: The Mediating Role of Job Satisfaction - Aslan Aslan, Kok Shiong Pong, 2026," *Journal of School Leadership*, March 29, 2026, <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/10526846261438721>.
- Osama et al., "IMPLEMENTASI GURU DALAM MENGATASI KESULITAN KETERAMPILAN BERBICARA SISWA PADA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA KELAS IX D DI MTs MUHAMMAD BASIUNI IMRAN SAMBAS TAHUN PELAJARAN 2024/2025," *ADIBA : JOURNAL OF EDUCATION* 5, no. 3 (2026): 97–109.
- Ignatius Septo Pramesworo and Aslan Aslan, "STRATEGI OPTIMALISASI KESIAPAN PENDIDIK DAN PESERTA DIDIK TERHADAP PEMANFAATAN AI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI RUANG BELAJAR: ANALISIS LITERATUR MENGENAI MITIGASI RISIKO PLAGIARISME, PENGUATAN INTEGRITAS AKADEMIK, DAN PENINGKATAN KAPASITAS LITERASI DATA," *Berajah Journal* 5, no. 12 (2026): 914–25, <https://doi.org/10.47353/bj.v5i12.168>.